BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Iman Mulyana, 2010:96). Sumber daya manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi (Eddy Soeryanto Soegoto,2014:306). Adapun menurut Malayu S.P Hasibuan (2012:244) Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009:2) kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik dan non fisik yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kesesuaian individu dalam organisasi yang memiliki standar untuk penilaian baik atau buruknya SDM tersebut yang memiliki peran dalam pencapaian organisasi.

2.1.1.1 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009:16) yaitu :

1. Pendidikan
2. Pelatihan

Adapun Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Hutapea dan Nurianna (2008:62) yaitu :

1. Memahami bidangnya masing-masing
2. Pengetahuan
3. Kemampuan
4. Semangat kerja
5. Kemampuan perencaan/ pengorganisasian

Berdasarkan indikator-indikator tersebut tentang kualitas sumber daya manusia peneliti mengambil indikator :

1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Memahami bidangnya masing-masing
4. Kemampuan

2.1.2 Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem adalah kumpulan/grup dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (Azhar Susanto, 2013:22). Adapun menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012:43) Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah

(Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Deddi Nordiawan 2010:201). Sedangkan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6), sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Dari definisi diatas dapat dikatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.1.2.1 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun indikator yang menjadi penilaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Nordiawan dkk, (2010:201) dan Bastian, (2010:319) adalah :

1. Pencatatan
2. Pelaporan

Sedangkan menurut Erlina dan Rasdianto (2013:6) indikator sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

1. Pencatatan
2. Penggolongan
3. Penafsiran
4. Peringkasan Transaksi
5. Pelaporan

Dari indikator variabel sistem akuntansi keuangan daerah diatas peneliti mengambil indikator :

1. Pencatatan
2. Pelaporan

2.1.3 Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari :

a. Pemerintah pusat ;

b. Pemerintah daerah ;

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu proses dari pengidetifikasian, pengukuran, pencatatan dan traksaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Erlina, Rasdianto, 2013:21). Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2010:9) Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Sementara menurut Mahmudi (2011:143) mengemukakan bahwa Laporan keuangan merupakan *output* dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah hasil akhir dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

2.1.3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun indikator penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Dadang Suwanda (2013:96), Nurlan Darise (2008:53) dan Erlina dan Rasdianto (2013:8) dan PP No 71 Tahun 2010 adalah

1. Andal
2. Relevan
3. Dapat Dipahami
4. Dapat Dibandingkan

1. Relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,serta dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dari indikator tersebut indikator yang digunakan untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah :

1. Andal
2. Relevan
3. Dapat Dipahami
4. Dapat Dibandingkan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kadek Desiana, Nyoman Trisna, Ni Kadek (2014) menyatakan dari hasil penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian Luh Kadek Sri Megawati, Edy Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2015) menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Emilda Ihsanti (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Teguh Wahyono (2004:12) menyatakan bahwa informasi yang andal sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi, keterandalan di sini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Teguh Wahyono menjelaskan lebih lanjut bahwa Sumber Daya Manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal).

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian Kadek Desiana, Nyoman Trisna, Ni Kadek (2014) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakain tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian Luh Kadek Sri

Megawati, Edy Sujana dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2015) menyatakan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

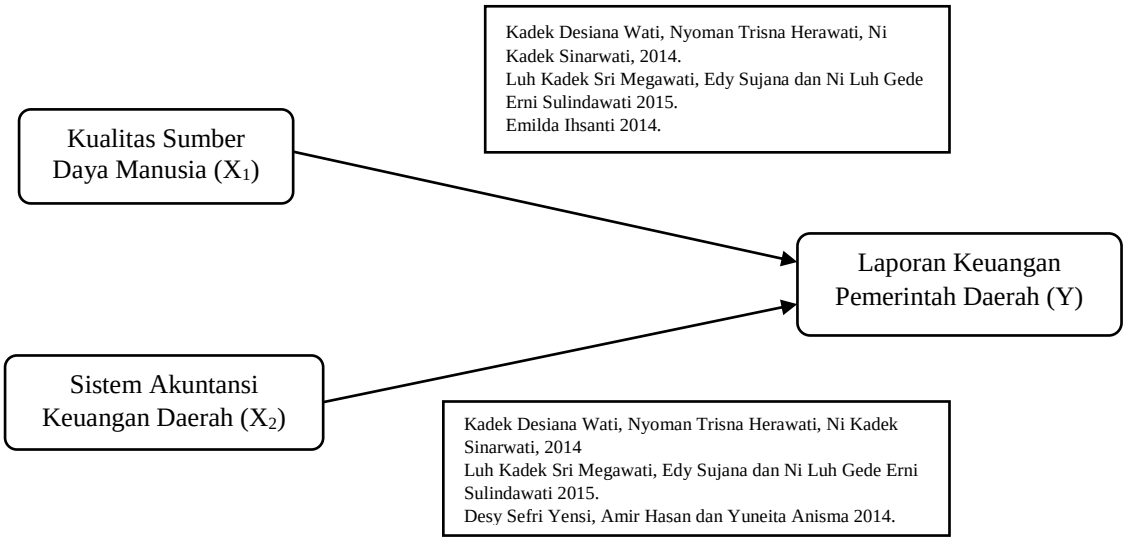
Menurut Bastian (2007:4) Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sementara menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Dari hasil penelitian Desy Sefri Yensi, Amir Hasan dan Yuneita Anisma (2014) mengatakan bahwa sistem berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah satu kesatuan yang apabila diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterpkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah sesuai SAP yakni releva, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variabel bebas yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



GAMBAR 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2014:64). Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini,diantarnya :

H_1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

H_2: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.